ABSTRAK

Ahmad Burhan Firdaus, 126102202135, Pembagian Harta Bersama Dari Hasil Royalti Dalam Perpektif Hukum Positif Dan KHI , Program Studi Hukum Keluarga Islam , Jurusan Syari'ah , Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Dr. Syahril Siddik M.A

Kata Kunci: Harta Bersama, Royalti, Hukum Positif, KHI

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya harta bersama dari hasil royalti dalam perkawinan yang tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana ketentuan penyelesaian royalti dalam hukum positif sebagai harta bersama? 2) Bagaimana ketentuan penyelesaian pembagian harta bersama dari hasil royalti dalam KHI sebagai harta bersama?

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hal ini karena metode kualitatif memungkinkan kita untuk menghasilkan wawasan, mengkonstruksi fenomena, dan membuat laporan yang sistematis dan rinci mengenai penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif. Yurisprudensi normatif adalah ilmu yang mempelajari hukum yang menyangkut proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum sebagai norma, kaidah, asas hukum, asas hukum, teori hukum, teori hukum dan literatur lainnya guna menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan proses membaca sumber-sumber, khususnya pembacaan literatur dan dokumen yang relevan berupa Al-Quran, Hadits, dan undang-undang (dalam hal ini berkaitan dengan royalti dan kepemilikan bersama). kamu mengerti. Hal ini disebabkan karena penelitian jenis penelitian hukum normatif menggunakan literatur yang bersifat teoritis dan menghubungkannya dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harta bersama dapat dikatakan serupa dengan Syirkah, karena merupakan harta yang diperoleh bersama-sama oleh suami istri selama perkawinan dan oleh karena itu dipandang sebagai hasil kerja sama mereka. Pasal 91 Bagian 1 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa harta bersama dapat berupa barang berwujud maupun tidak berwujud. Benda material misalnya benda bergerak, benda diam, atau surat berharga. Di sisi lain, yang tidak berwujud dapat mencakup hak dan kewajiban. Persoalan harta bersama seringkali menjadi bahan perbincangan ketika sebuah perkawinan berakhir, apalagi jika berujung pada perceraian. Dalam hal perceraian, harta komunal diatur menurut hukum Islam bagi

pasangan yang beragama Islam dan hukum perdata bagi pasangan non-Muslim.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harta bersama dianggap seperti syirkah karena merupakan kekayaan yang didapat bersama oleh suami istri selama pernikahan, sehingga dianggap sebagai hasil kerjasama antara keduanya. Pasal 91 bagian 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama dapat berupa barang fisik maupun barang non-fisik. Sebagai contoh, benda berwujud bisa berupa benda yang bergerak, benda diam, atau surat-surat berharga. Sementara itu, hal tak berbentuk dapat berupa hak dan tanggung jawab. Isu harta bersama seringkali menjadi kontroversial saat pernikahan berakhir, terutama jika berakhir karena perceraian. Jika perceraian terjadi, aset bersama akan diatur sesuai dengan hukum Islam untuk pasangan beragama Islam dan KUH Perdata untuk pasangan non-Islam. Menurut Pasal 232 KUH Perdata, ketika suatu perkawinan berakhir karena perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi kecuali ada perjanjian kawin yang memisahkan atau meniadakan harta bersama tersebut. Selanjutnya, Pasal 128 KUH Perdata turut mengatur bahwa ketika perkawinan berakhir, harta bersama akan dibagi menjadi dua bagian antara suami dan istri, atau kepada ahli waris mereka. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini menelusuri kemungkinan konflik atau kesepakatan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam kaitannya dengan royalti lagu sebagai harta bersama. Beberapa penelitian sebelumnya mungkin telah fokus pada satu sistem hukum tanpa memperhitungkan interaksi atau perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dalam mengelola hak cipta lagu dalam kerangka pernikahan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

ABSTRACT

Ahmad Burhan Firdaus, 126102202135, Division of Joint Assets from Royalty Proceeds from the Positive Law and KHI Perspective, Islamic Family Law Study Program, Department of Sharia, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, 2024, Supervisor: Dr. Syahril Siddik M.A

Keywords: Joint Property, Royalties, Positive Law, KHI

This research is motivated by the existence of joint assets from royalties in marriage which does not rule out the possibility of the existence of assets belonging to each husband and wife. These joint assets can be in the form of immovable objects, movable objects and securities, while intangible assets can be in the form of rights and obligations. Both can be used as collateral by one party with the consent of the other party. Husband and wife, without the consent of one of the parties, are not allowed to sell or transfer joint property.

The formulation of the problem in this research is: 1) What are the provisions for the settlement of royalties in positive law as joint assets? 2) What are the provisions for settling the distribution of joint assets from royalty proceeds in KHI as joint assets?

The research method used was a qualitative method. This is because qualitative methods are able to produce knowledge findings, construct phenomena and are able to make systematic and detailed reports related to this research. In this research, researchers used a normative juridical approach. Normative juridical is legal research with a process for researching and studying law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal doctrine, legal theory and other literature, to answer the legal problems being studied. The data collection technique used in this research is to process reading sources, namely by reading related literature and taking what is obtained through documents in the form of the Koran, hadith, laws which in this case relate to Royalties and Joint Property. This is because the type of research used by normative juridical research uses literature that is theoretical in nature which is then connected to the problem that is the subject of discussion.

The results of this research show that joint assets are considered like syirkah because they are wealth obtained jointly by husband and wife during marriage, so they are considered the result of cooperation between the two. Article 91 part 1 of the Compilation of Islamic Law (abbreviated as KHI) states that joint assets can be in the form of physical goods or non-physical

goods. For example, tangible objects can be moving objects, stationary objects, or securities. Meanwhile, intangible things can include rights and responsibilities. The issue of joint property often becomes controversial when a marriage ends, especially if it ends due to divorce. If a divorce occurs, joint assets will be regulated in accordance with Islamic law for Muslim couples and the Civil Code for non-Islamic couples. According to Article 232 of the Civil Code, when a marriage ends due to divorce, joint assets acquired during the marriage must be divided unless there is a marriage agreement that separates or eliminates the joint assets. Furthermore, Article 128 of the Civil Code also regulates that when a marriage ends, joint assets will be divided into two parts between husband and wife, or to their heirs. Another difference is that this research explores possible conflicts or agreements between national law and Islamic law in relation to song royalties as joint property. Some previous research may have focused on one legal system without considering interactions or comparisons between two different legal systems. Therefore, the results of this research provide a deeper understanding of the complexity of managing song copyright within the framework of marriage from the perspective of positive law and Islamic law.

ملخص

أحمد برهان فردوس، 126102202135، قسم الأصول المشتركة من
، برنامج دراسة قانون الأسرة KHI عائدات الإتاوة من القانون الإيجابي ومنظور
الإسلامي، قسم الشريعة، كلية الشريعة والعلوم القانونية، جامعة السيد علي رحمة الله
الإسلامية الحكومية تولونج أجونج، 2024، مشرف: دكتور. سيهريل صديق م.أ

الكلمات المفتاحية: الملكية المشتركة، الإتاوات، القانون الوضعي، تصنيف الشريعة
الإسلامية

وينطلق هذا البحث من وجود أصول مشتركة من الإتاوات في الزواج مما لا ينفي
إمكانية وجود أصول تعود لكل زوج وزوجة. ويمكن أن تكون هذه الأصول
مالية، في المشتركة في شكل أشياء غير منقولة وأشياء منقولة وأوراق
حين أن الأصول غير الملموسة يمكن أن تكون في شكل حقوق والتزامات. ويمكن
استخدام كلاهما كضمان من قبل طرف واحد بموافقة الطرف الآخر. لا يجوز
.للزوج والزوجة، دون موافقة أحد الطرفين، بيع أو نقل ملكية مشتركة

وصياغة المشكلة في هذا البحث هي: 1) ما هي أحكام تسوية الإتاوات
ما هي أحكام تسوية توزيع في القانون الوضعي كأصول مشتركة؟ 2)
الأصول المشتركة من عائدات الإتاوات في المملكة للاستثمارات الفندقية كأصول
مشتركة؟

وكانت طريقة البحث المستخدمة هي الطريقة النوعية. وذلك لأن
الأساليب النوعية قادرة على إنتاج نتائج المعرفة، وبناء الظواهر، وتكون قادرة على
تقديم تقارير منهجية ومفصلة تتعلق بهذا البحث. وقد استخدم الباحثون في هذا البحث
المنهج القانوني المعياري. القانون المعياري هو بحث قانوني يتضمن عملية بحث
ودراسة القانون باعتباره قواعد وقواعد ومبادئ قانونية ومبادئ قانونية ومذهب
قانوني ونظرية قانونية وأدبيات أخرى، للإجابة على المشكلات القانونية التي تتم
دراستها. إن أسلوب جمع البيانات المستخدم في هذا البحث هو معالجة مصادر
القراءة، أي من خلال قراءة الأدبيات ذات الصلة وأخذ ما تم الحصول عليه من
خلال الوثائق في شكل القرآن والحديث والقوانين التي تتعلق في هذه الحالة بالإتاوات

والملكية المشتركة. وذلك لأن نوع البحث الذي تستخدمه الدراسات القانونية المعيارية يستخدم أدبيات ذات طبيعة نظرية ترتبط بعد ذلك بالمشكلة موضوع البحث

وتبين نتائج هذا البحث أن الأصول المشتركة تعتبر كالشركة لأنها أموال يحصل عليها الزوج والزوجة بشكل مشترك أثناء الزواج، لذلك تعتبر نتيجة التعاون على أن بينهما. تنص المادة واحد وتسعون الجزءمن مجمع الشريعة الإسلامية الأصول المشتركة يمكن أن تكون في شكل سلع مادية أو سلع غير مادية. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الأشياء الملموسة أشياء متحركة، أو أشياء ثابتة، أو أوراق مالية. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تشمل الأشياء غير الملموسة الحقوق والمسؤوليات. كثيرا ما تصبح مسألة الملكية المشتركة مثيرة للجدل عند انتهاء الزواج، خاصة إذا انتهى بسبب الطلاق. في حالة حدوث الطلاق، سيتم تنظيم الأصول المشتركة وفقًا للشريعة الإسلامية للأزواج المسلمين والقانون المدني للأزواج غير الإسلاميين. وفقا للمادة مائتان وإثنان وثلاثون من القانون المدني، عندما ينتهي الزواج بسبب الطلاق، يجب تقسيم الأصول المشتركة المكتسبة أثناء الزواج ما لم يكن هناك اتفاق زواج يفصل أو يلغي الأصول المشتركة. علاوة على ذلك، تنص المادة مائة وثمانية وعشرون من القانون المدني أيضًا على أنه عند انتهاء الزواج، يتم تقسيم الأصول المشتركة إلى قسمين بين الزوج والزوجة، أو لورثتهما. والفرق الآخر هو أن هذا البحث يستكشف النزاعات أو الاتفاقيات المحتملة بين القانون الوطني والشريعة الإسلامية فيما يتعلق بإتاوات الأغنية كملكية مشتركة. ربما ركزت بعض الأبحاث السابقة على نظام قانوني واحد دون النظر إلى التفاعلات أو المقارنات بين نظامين قانونيين مختلفين. ولذلك فإن نتائج هذا البحث توفر فهمًا أعمق لتعقيد إدارة حقوق التأليف والنشر للأغاني في إطار الزواج من منظور القانون الوضعي والشريعة الإسلامية